



# SEJARAH TERBENTUKNYA LEMBAGA ADAT PARTUHA MAUJANA SIMALUNGUN

Zulham Siregar<sup>a</sup>, Suprayitno<sup>b</sup> & Warjio<sup>c</sup>

siregarzulham20@gmail.com, nisanaceh@gmail.com & warjio@gmail.com

<sup>a</sup>Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

<sup>b</sup>Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

<sup>c</sup>Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

## ARTICLE INFO

Received: 17 April 2020

Revised: 25 June 2020

Accepted: 30 June 2020

Published: 30 June 2020

## Permalink/DOI

10.17977/um020v14i12020p42

Copyright © 2019, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

## ABSTRACT

*This article discusses the history of the formation of the traditional institution Partuha Maujana Simalungun. This article answers the question of how the identity of the Simalungun people before the formation of the Partuha Maujana Simalungun traditional institution and why the Simalungun people need to form the Partuha Maujana Simalungun traditional institution. This research uses the historical method through four stages: heuristics (collection of historical sources); verification (source criticism); interpretation (historical analysis and interpretation); and historiography (history writing). Sources as historical data obtained from a number of documents and literature from the colonial to post-colonial periods. This study found that the identity of the simalungun people before the formation of the customary institution Partuha Maujana Simalungun already existed but due to the arrival and influence of outsiders, especially toba and colonial Batak made the Simalungun identity confused. As a result of this uncertainty, the intellectuals of the Simalungun people were moved to create a traditional institution to overcome the uncertainty of the Simalungun people's identity.*

## KEYWORDS

*History of Simalungun Traditional Institutions, Simalungun Identity.*

## ABSTRAK

Artikel ini membahas sejarah terbentuknya lembaga adat Partuha Maujana Simalungun. Artikel ini menjawab permasalahan bagaimana identitas orang Simalungun sebelum terbentuknya lembaga adat Partuha Maujana Simalungun dan mengapa orang simalungun perlu membentuk lembaga adat Partuha Maujana Simalungun. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahap: heuristik (pengumpulan sumber sejarah); verifikasi (kritik sumber); interpretasi (analisis sejarah dan penafsiran); dan historiografi (penulisan sejarah). Sumber sebagai data sejarah yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan literatur dari periode kolonial hingga pascakolonial. Penelitian ini menemukan bahwa identitas orang simalungun sebelum terbentuknya lembaga adat Partuha Maujana Simalungun sudah ada namun karena kedatangan dan pengaruh dari orang-orang luar khususnya batak toba dan kolonial membuat kegamangan identitas orang Simalungun. Akibat kegamangan inilah membuat para cendekiawan orang Simalungun tergerak untuk membuat sebuah lembaga adat untuk mengatasi kegamangan identitas orang-orang Simalungun.

## KATA KUNCI

Sejarah Lembaga Adat Simalungun, identitas Simalungun.

## PENDAHULUAN

Partuha Maujana Adalah sebuah lembaga adat yang didirikan sejak dilaksanakannya seminar kebudayaan Simalungun pada tahun 1964. Sejarah pendirian lembaga adat Partuha Maujana Simalungun di latar belakangin oleh keinginan untuk menghidupkan kembali kebudayaan dan identitas orang Simalungun yang telah tergerus oleh perkembangan zaman. Kelahiran lembaga adat Partuha Maujana Simalungun ini merupakan sebuah rangkaian panjang dari perkembangan masyarakat Simalungun yang bermula dari masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai terjadinya revolusi sosial hingga terbunuhnya raja-raja di Simalungun.

Berdasarkan data Sejarah yang ditemukan bahwa orang-orang Simalungun sudah berjumpa dengan kebudayaan asing dimulai sejak adanya hubungan dagang dengan Tiongkok pada sekitar abad ke-6. Selanjutnya, pada sekitar tahun 1900an orang simalungun mulai mengalami dinamika sosial budaya akibat dari ekspansi “*pax nederlandica*” kolonial. Pada sisi lain dari periode ini orang Jerman juga datang dan berjumpa dengan orang Simalungun. Misi Jerman adalah menyebarkan agama Kristen Protestan kepada orang Simalungun, dengan disponsori oleh badan zending *Rheinische Mission Gesselschaft* (RMG). Dalam perkembangan kegiatan kristenisasi, terjadi dominasi suku Batak Toba yang membuat kristenisasi di Simalungun tidak berjalan efektif dan kalangan Kristen Simalungun merasa *hasimalungunon* mereka terabaikan.

Berdasarkan hal tersebut, Pada 13 Oktober 1928, 14 orang tokoh Kristen Simalungun sepakat mengadakan diskusi. Diskusi tersebut mengenai cara-cara yang lebih baik untuk mengabarkan injil di Simalungun. Suara mayoritas dalam diskusi menyatakan bahwa bukan bahasa dan orang-orang Batak Toba yang harus dipakai dalam penginjilan Simalungun melainkan bahasa dan orang-orang Simalungun (Tarigan 2014). 14 orang intelektual Kristen Simalungun tersebut memutuskan mendirikan sebuah organisasi bernama *Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen*. Organisasi ini bertujuan untuk melestarikan bahasa Simalungun dan mengefektifkan kristenisasi. *Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen* mengakhiri aktivitasnya pada saat Jepang datang dan berkuasa. Pada tahun 1942, semua lembaga baik agama maupun pendidikan dihentikan kegiatannya dan hanya bisa berjalan jika mendapat instruksi dari pemerintahan Jepang.

Ketidak puasan orang Simalungun tidak sampai disitu saja, dengan dibentuknya HKBP Distrik Simalungun yang diresmikan oleh jemaat Simalungun yang bertempat di Pematang Raya (N.N 1941, 5). Semangat menunjukkan identitas Simalungun semakin menguat, bukan hanya di dalam tubuh Gereja HKBP Simalungun, tetapi juga dikalangan tokoh politik Simalungun. Dalam tubuh organisasi HKBP Simalungun mencuat keinginan untuk melepaskan diri secara penuh “*manjae*” dari HKBP Pearaja. Kaum komunitas Kristen Simalungun menuntut supaya berdiri Gereja Simalungun dengan nama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS).

Bergerak dari kondisi yang sulit tersebut maka timbullah keinginan tokoh-tokoh Simalungun pada masa itu, untuk merangkul dan menyatukan semua elemen Simalungun termasuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan identitas *hasimalungunon* (Ahap Simalungun). Beberapa tokoh Simalungun masa itu, antara lain Pdt. JP Siboro (Wakil

Ephorus HKBPS) berikut Tuan Bandaralam Purba Tambak (Keturunan Raja Silou yang beragama Muslim), berinisiatif membentuk lembaga yang bisa mempersatukan semua elemen masyarakat, dengan nama Partuha Maujana Simalungun (PMS).

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana identitas Etnik Simalungun sebelum terbentuknya lembaga adat Partuha Maujana Simalungun ? (2) Mengapa etnis Simalungun perlu membentuk lembaga adat Partuha Maujana Simalungun ?

## **METODE**

Studi ini menggunakan metode sejarah. Data penelitian diperoleh dari sejumlah arsip kolonial dan sumber lainnya baik yang tergolong sumber primer maupun sekunder yang relevan serta mengandung evidensi dan fakta sejarah. Fokus penelitian ini adalah Lembaga adat Partuha Maujana Simalungun dan dinamika identitas orang Simalungun dari masa kolonial hingga pasca kolonial. Lingkup temporal mencakup periode Kolonial hingga pasca kolonial, di mana pada pasca kolonial merupakan titik awal pergulatan identitas orang simalungun karena keterkejutan akibat migrasi besar besaran dari luar Simalungun. Sedangkan pasca Kolonial adalah bagaimana orang simalungun kembali menguatkan identitas mereka setelah berakhirnya masa penjajahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedatangan Belanda DiSimalungun**

Orang Simalungun mulai berjumpa dengan bangsa barat sejak akhir abad ke-19 dan semakin intensip pada awal abad ke-20 yaitu dengan orang Belanda. Orang Belanda datang adalah dengan misi dagang atau kepentingan ekonominya dan melakukan penjajahan, untuk melindungi usaha perkebunan yang telah dimulai di kawasan Sumatera Timur, serta melanjutkannya ke daerah Simalungun. Orang Simalungun oleh Belanda dianggap sebagai bagian dari daerah “Batak Merdeka” karena itu perlu dikuasai melalui berbagai pendekatan terhadap orang-orang Simalungun yang memiliki sistim kerajaan.

John Anderson (1826, 119) ilmuwan dari Inggris tahun 1823 telah berhasil mengunjungi daerah Sumatera Timur dan bertemu dengan orang Simalungun di daerah Asahan, Batubara, bahkan ia sampai ke daerah Tanah Jawa Simalungun. Kemudian menurut Tideman (1922, 40) bahwa tahun 1865 pejabat kolonial Belanda Controleur A. C. Van den Boer, mengunjungi daerah Asahan, Batubara, dan Tanah Jawa, demikian juga L. De Schumaker mengunjungi daerah hulu Batubara dan Simalungun, dengan motif ekonomi untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan perluasan perkebunan ke berbagai daerah di Sumatera Timur.

Memasuki tahun 1888 pemerintah kolonial mulai campur tangan terhadap kebebasan orang Simalungun dengan alasan penertiban terhadap wilayah Batak merdeka untuk dimasukkan menjadi bagian pemerintahan kolonial. Orang Simalungun dari Raja Raya yaitu Tuan Rondahaim Saragih Garingging memimpin rakyatnya

melakukan perlawanan, demikian juga Raja Siantar yaitu Sang Nawaluh Damanik, melakukan perlawanan. Namun kurangnya kesatuan antara kerajaan-kerajaan tersebut, memudahkan kolonial Belanda untuk menguasai dengan jalan membantu salah satu dari pihak-pihak kerajaan yang bersengketa. Satu demi satu Raja orang Simalungun takluk dan mengaku tunduk kepada pemerintahan Belanda,

Sebagai konsekwensinya maka raja orang Simalungun melanjutkan pengakuan tunduk mereka dalam bukti tertulis dihadapan pemerintah kolonial yang diwakili C. J. Westenberg Asisten Residen urusan Batak, dengan penandatanganan Plakat Pendek atau *Korte Verklaring*. Waktu dan tempat penandatanganan Plakat Pendek atau *Korte Verklaring* ini ditentukan pemerintah kolonial dan dilakukan di pusat kerajaan, untuk Raya dilaksanakan tanggal 9 Nopember 1902 bertempat di Pematang Raya. Untuk Pane dilaksanakan tanggal 24 September 1903 bertempat di Pematang Panei. Untuk Dolok Silou dilaksanakan tanggal 27 April 1904 bertempat di Pematang Dolok, Untuk daerah Purba dilaksanakan 4 Mei 1904 di Pematang Purba (N.N 1904).

Liddle (1970) berpendapat bahwa para raja orang Simalungun yang telah berada dibawah tertib administrasi politik kolonial Belanda tetap melaksanakan sistem kerajaan, dan kolonial Belanda memanfaatkan system tersebut dengan cara mengukuhkannya demi kepentingan ekonomi dan politik mereka di Simalungun. Sementara itu peradilan di tingkat *onderafdeeling* Simalungun yakni *kerapatan nabolon*, pemerintah kolonial menunjuk salah seorang diantara raja orang Simalungun untuk menjadi ketua persidangan, yaitu atas hunjukan asisten residen *Afdeeling Simeloengoen en Karolanden*. Dalam prakteknya, walaupun ketua persidangan dihunjuk dari seorang raja Simalungun akan tetapi tetap dibawah kendali pemerintah kolonial.

Pada sisi lain dengan masuknya penetrasi kolonial tersebut, bagi kehidupan rakyat semakin terperosok kepada jaring politik kebudayaan kolonial. Kolonial menanamkan sikap kepada rakyat untuk patuh dan mengabdikan kepada raja serta punggawanya sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah (Neiboer 1934). Perlawanan orang Simalungun terhadap terhadap raja hampir tidak pernah muncul sepanjang periode kolonial, meskipun rakyat tidak puas dengan kondisi demikian, namun sifat masyarakat agraris yang melekat dan keterikatannya terhadap adat tradisinya yang kuat membuat mereka enggan melakukan protes apalagi sampai melawan rajanya (Lombard and Reid 1982, 54).

### Misionaris Kristen di Simalungun

Masuknya zending ke tanah Batak Sumatera Utara pada abad ke-19 telah membuka lembaran sejarah baru bagi orang Simalungun. Orang pertama yang menyebarkan Injil (zendeling) memasuki Tanah Batak tahun 1824 adalah Richard Buton dan Nathaniel Ward dari lembaga zending Inggris yaitu *Baptist Mission Society of England* (Lumbantobing 1992, 65). Kemudian 1861 usaha zending ke daerah ini muncul kembali oleh zendeling Lidwig Ingwer Nommensen, yang diutus *Rheinsische Missions Gesellschaft* yang berpusat di Barmen, Jerman. Ada dua alasan yang menyebabkan zending RMG untuk memasuki daerah Batak yaitu: Pertama, zending RMG yang sejak

1835 telah mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja menyebarkan agama Kristen di daerah Kalimantan Selatan harus henggang sebagai akibat pecahnya perang Banjar tahun 1859.

Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah zendeling kehilangan pekerjaan dan untuk itu perlu dicari daerah zending yang baru. Kedua, informasi tentang masyarakat Batak berupa buku yang beraksara Batak hasil karya Neubronner Van der Tuuk, secara tidak sengaja ditemukan seorang Inspektur zending RMG yang bernama Fabri, di rumah Witteven seorang tokoh zending Belanda. Buku itu ternyata berisi terjemahan kitab Injil Yohannes dalam bahasa Batak Toba karya Van der Tuuk. Neubronner van der Tuuk pada awalnya adalah zendeling Belanda, yang tahun 1849 dikirim oleh Lembaga Alkitab Belanda tinggal di Barus, pesisir Barat Sumatera. Ia mempunyai keahlian khusus mengenai bahasa Batak dan telah menulis tata-bahasa Batak, menterjemahkan beberapa bab dari Kitab Injil ke dalam bahasa Batak yang kemudian dicetak oleh Lembaga Alkitab Belanda. Boleh jadi ialah orang Eropa yang pertama melihat danau Toba. Ia kemudian bekerja sebagai ahli bahasa dan etnologi untuk pemerintah Belanda, dan juga mengadakan penelitian tentang bahasa Lampung, Kawi, Bali dan menyusun kamus Batak-Belanda.

Setelah mengadakan pembicaraan dengan Witteven diperoleh kesepakatan untuk menyatukan pekerjaan pemberitaan injil di Tanah Batak dibawah bimbingan RMG, sehingga tenaga zending yang menganggur di Kalimantan dikirim ke Tapanuli. Pada tanggal 7 Oktober 1861, berlangsung pertemuan antara zendeling Jerman: Heine dan Klammer, dengan zendeling Belanda: Van Asselt dan Betz di Sipirok Tapanuli, untuk membicarakan cara-cara penginjilan dan daerah kerja masing-masing. Semenjak saat itu usaha perintisan pekabaran injil di tanah Batak dilakukan oleh Jerman. Perwujudan zending di daerah ini kemudian mengutus L. I. Nommensen ke Sumatera, dan tiba di Barus pada tahun 1862. Di sana untuk sementara ia tinggal sambil meningkatkan pengetahuannya mengenai bahasa dan adat Batak Toba, dan Melayu. Setelah merasa cukup lalu dari Barus dia berangkat ke Angkola, bagian Selatan Tanah Batak yang ditemukannya pada saat itu sudah tersebar agama Islam, sehingga pada tahun 1864, dia meneruskan perjalanannya ke pedalaman tanah Batak yaitu lembah Silindung dan menetap di tengah-tengah masyarakat Batak yang masih memeluk agama suku itu.

Orang Batak Toba yang tinggal di Silindung pada awalnya kurang menyenagi kehadiran Nommensen. Kesadaran demikian mereka hubungkan dengan pengalaman sejarah sebelumnya, dimana setiap kunjungan orang asing kulit putih selalu diikuti dengan bencana, kegagalan panen ataupun wabah penyakit. Penduduk beranggapan bahwa bencana-bencana itu disebabkan oleh karena orang asing kulit putih itu tidak memelihara adat, bahkan mereka berprasangka bahwa orang asing itu akan merusak adat mereka.

### **Memandirikan Identitas Orang Simalungun di dalam Gereja**

Dinamika Identitas etnis Simalungun tidak terlepas dari peristiwa historis tahun 1903 dengan hadirnya zendeling August Theis di Pamatang Raya oleh zending RMG,



yang sudah terlebih dahulu melakukan misinya terhadap orang Batak Toba di Residensi Tapanuli. Kemudian tahun 1907 kolonial Belanda menganeksasi dan menguasai wilayah orang Simalungun, yang ditandai dengan penandatanganan „pengakuan tunduk” atau *korte verklaring* para Raja Simalungun, sehingga kegiatan misi zending semakin gencar, dan arus migrasi orang “asing” meningkat, terutama orang Batak Toba yang didukung kolonial dan zending RMG. Pada tahun 1928 komunitas orang Kristen Simalungun muncul yang merasakan bahwa mereka „terancam punah” dihipit budaya etnis lain di tanah leluhur sendiri dalam wadah Gereja Batak yang berpusat di Pearaja Tarutung (Tapanuli). Mereka bangkit melawan dan menunjukkan serta menegaskan identitas mereka sebagai orang Simalungun dalam tubuh gereja Batak, membentuk *Komite na ra marpodah, Kongsi Laita, Kongsi Sintua, Kas Saksi Ni Kristus*, menterjemahkan Alkitab ke bahasa Simalungun, menerbitkan Majalah „SINALSAL” dalam bahasa Simalungun, sehingga jumlah komunitas bertambah.

Orang-orang Simalungun merasa tidak puas dengan otonominya dalam HKBP Distrik Simalungun yang sebelumnya telah diresmikan oleh jemaat Simalungun dibawah satu distrik yang diberi nama Distrik HKBP Simalungun yang berkedudukan di Pematang Raya (N.N 1941) Selanjutnya pada tahun 1953 mereka menjadi satu Distrik dengan nama Huria Kristen Batak Protestan Simalungun (HKBPS) dalam organisasi gereja Batak yang berpusat di Pearaja (Tapanuli) (H. Saragih 2018, 221). Komunitas ini merasakan bahwa mereka diatur dan dikendalikan oleh HKBP Pearaja, yang memandang bahwa Simalungun itu sama seperti orang Batak Toba.

Pada periode sesudah tahun 1953, semangat menunjukkan identitas Simalungun semakin menguat, bukan hanya di dalam tubuh Gereja HKBP Simalungun, tetapi juga dikalangan tokoh politik Simalungun. Dalam tubuh organisasi HKBP Simalungun mencuat keinginan untuk melepaskan diri secara penuh „*manjae*” dari HKBP Pearaja. Kaum komunitas Kristen Simalungun menuntut supaya berdiri Gereja Simalungun dengan nama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS).

Berdirinya GKPS pada 2 September 1963, merupakan keberhasilan orang Simalungun dan sebagai penguatan identitas etnik Simalungun. Walaupun orang Simalungun bukan seluruhnya beragama Kristen Protestan (GKPS), namun penguatan identitas Simalungun (*hasimalungunon*) sampai saat ini tetap dijaga dan dipelihara GKPS. Orang Simalungun menamakan diri *halak* Simalungun, mempunyai wilayah Simalungun, merasa terikat oleh adanya kesatuan turunan nenek moyang, dan mengaku bahwa mereka berasal dari suatu rumpun, memiliki leluhur, marga „*morga*”, adat Kebiasaan, busana khas, sistim kepercayaan, bahasa „*sahap*”, serta sistem mata pencaharian. Menyadari adanya warisan leluhur yang senasib sepenanggungan „*sisada parmaluan, sisada lungun*” telah menggugah mereka untuk bersatu dalam „*ahab Simalungun*” untuk menunjukkan identitas mereka sebagai orang Simalungun.

### **Mendirikan Lembaga Adat Simalungun (PMS)**

Terlepas dari berdirinya GKPS sebagai reaksi terhadap terbelenggunya orang Simalungun dari kebudayaan-kebudayaan yang telah berkembang luas pada orang

Simalungun. Gerakan kemandirian tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerincian batas-batas kebudayaan melalui seminar kebudayaan Simalungun yang digelar tahun 1964. Pelaksanaan seminar ini dapat dikatakan sebagai momentum awal penggalian dan revitalisasi kebudayaan Simalungun. Seminar tersebut telah menjadi inspirasi dalam penelitian-penelitian tentang hasimalungunon oleh generasi penerusnya.

Dalam seminar tersebut, membahas beberapa tema yang sangat dekat dan selalu hidup dikalangan orang Simalungun. Adapun tema yang dibahas dalam seminar tersebut seperti sisilah marga-marga, bahasa dan aksara, kesenian (tari dan nyanyian), hukum adat tanah, olahraga (permainan) dan perspektif kebudayaan Simalungun. Tema-tema yang diangkat tersebut merupakan tema yang dapat dilihat (diamati) menjadi pembeda atau batas-batas yang jelas (*well-defined boundaries*) yang memisahkan kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya. Secara *de facto* masing-masing kelompok etnik itu memiliki budaya yang padu.

Menurut Malinowski, satu kelompok etnik dapat dibedakan dengan yang lain baik dalam organisasi kekerabatan, bahasa, agama (sistem kepercayaan), ekonomi, tradisi (hukum), maupun pola hubungan antar kelompok etnik, termasuk dalam pertukaran jasa dan pelayanan. Dia menegaskan bahwa batas-batas suatu bangsa dapat dituangkan ke dalam sebuah peta etnografi. Karena masing-masing bangsa (etnis) di samping memiliki batas-batas “*de facto*” budaya dan keturunan (ras). Sebab itu pula, suatu bangsa (etnis) tidak hanya dapat dibedakan dari batas-batas teritorial tetapi juga dari karakteristik budaya seperti organisasi sosial, bahasa, agama, sistem kepercayaan, ekonomi, hukum, dan pola kerja sama dengan bangsa lain (Pelly 2016, 5). Bahkan menurut Barth kelompok-kelompok etnik tidak hanya didasarkan pada teritorial yang ditempatinya, tetapi pada pernyataan dan pengakuan yang berkesinambungan mengenai identifikasi dirinya. Menurutnya, apabila suatu kelompok tertentu memiliki kriteria yang sama dalam penilaian dan pertimbangan (*evaluation and judgement*), maka memungkinkan sesama mereka dapat melakukan “*playing the sama game*” yang disebutnya sebagai batas-batas sosial (*social boundaries*) (Barth 1998, 15). Dengan begitu, batas-batas etnik yang paling penting adalah batas-batas sosial, walaupun mereka memiliki teritorial sendiri.

Seminar tersebut adalah bentuk implikasi nyata dalam mewujudkan jati diri etnis Simalungun sebagai satu kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan Sendiri. Seminar tersebut adalah sebagai bagian dari upaya mempersonalisasikan kebudayaan (*cultural personalized*) Simalungun untuk memelihara identitas kebudayaannya dengan cara menetapkan kategori-kategori sosial dan perilaku interaksinya. Jadi, identitas kebudayaan mereka baik berupa materiil maupun immaterial disusun sebagai pembeda dengan etnis lain yang kemudian disalurkan kepada individu atau kelompok sebagai identitas masyarakat dan kebudayaannya.

Selama ini kebudayaan non Simalungun telah merasuki orang Simalungun pada saat pembukaan perkebunan di Simalungun. Proses pembauran etnis Simalungun terhadap unsure-unsur kebudayaan lain sudah terjadi sejak adanya hubungan dagang kepada tiongkok yaitu sekitar abad ke-6. Selanjutnya, hubungan kepada orang jawa

sekitar tahun 1295. Oleh sebab itu kepribadian etnis Simalungun dipengaruhi oleh terjadinya proses pembauran yang telah dilalui (S. Saragih 2008, 76).

Dinamika kebudayaan Simalungun berhadapan dengan konteks yang dialaminya baik ditinjau dari segi unsur-unsur universal kebudayaan (bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian), dapat ditinjau dari aspek kebudayaan sudah tentu akan mengalami perkembangan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam perkembangannya banyak kebudayaan suku bangsa yang mengalami pergeseran, semakin menyerupai kebudayaan suku bangsa disekitarnya (Sipayung 2014, 4).

Berdasarkan hal tersebut, tampaknya kebudayaan etnis Simalungun juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan zaman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor-faktor yang bersifat internal maupun faktor-faktor yang bersifat eksternal. Perubahan yang terjadi dalam kebudayaan Simalungun dapat dilihat dari dua sisi yaitu bagaimana kebudayaan Simalungun Pada masa lampau, dan bagaimana kebudayaan itu mewujudkan diri pada masa kini dan yang akan datang.

Satu kejadian penting dalam pergulatan jati diri orang Simalungun adalah adanya dorongan untuk memandirikan GKPS dan HKBPS. Peristiwa tersebut tercatat pada tanggal 2 September 1963, sekitar 1 tahun sebelum pelaksanaan Seminar Kebudayaan Simalungun pada tahun 1964. Gerakan kemandirian tersebut diikuti oleh perincian batas-batas kebudayaannya melalui seminar kebudayaan Simalungun tersebut.

Melalui seminar kebudayaan tersebut telah ditetapkan bahwa “ahap” adalah identitas etnis Simalungun. Ahap adalah moralitas kebudayaan Simalungun yang bersifat universal yang diharapkan dapat mengayomi seluruh kebudayaan dan etnis simalungun. Rumusan seminar tersebut telah menjadi patokan dalam perkembangan kebudayaan Simalungun karena telah dirumuskan batas-batas kebudayaan Simalungun. Namun harus digaris bawahi batas-batas etnisitas dewasa ini sudah semakin menyempit, oleh karena itu reinterpretasi terhadap kebudayaan itu penting disesuaikan dengan perubahan sosial budaya yang tengah atau akan terjadi.

Keinginan tokoh-tokoh Simalungun pada masa itu, untuk merangkul dan menyatukan semua elemen Simalungun termasuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan identitas hasimalungunon (Ahap Simalungun). Beberapa tokoh Simalungun masa itu, antara lain Pdt. JP Siboro (Wakil Ephorus HKBPS) berikut Tuan Bandaralam Purba Tambak (Keturunan Raja Silou yang beragama Muslim), berinisiatif membentuk lembaga yang bisa mempersatukan semua elemen masyarakat, dengan nama Partuha Maujana Simalungun (PMS). Partuha diartikan sebagai tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat; sedangkan Maujana adalah kaum terpelajar, cendekiawan, kaum muda TNI, Polri, dan PNS. Semua elemen tersebut bersatu dalam PMS, guna menghidupkan, membangun dan mengembangkan kembali budaya Simalungun (Purba.).

Keberadaan lembaga adat Partuha Maujana Simalungun tidak semata –merta mengembalikan kebudayaan Simalungun yang sudah berbaur dengan kebudayaan luar kembali seperti semula. Partuha Maujana Simalungun diharapkan mampu membawa



kebudayaan Simalungun yang selama ini telah berbaur tersebut kembali seperti semula. Tentunya dalam proses pengembalian tersebut perlu jangka waktu yang panjang namun bukan berarti tidak bisa dilakukan.

Keberadaan lembaga adat ini pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, agar khasanah budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Oleh sebab itu, peristiwa kemandirian GKPS (1963) dan pelaksanaan seminar kebudayaan Simalungun (1964) tersebut menjadi titik awal (*rallying point*) kesadaran etnis dan kesetiakawanan sosial (*ethnic based solidarity*). Jika kemandirian GKPS telah memberikan ruang gerak leluasa terhadap penyebaran aspek rohani orang Simalungun Yang beragama Nasrani, maka seminar kebudayaan dan pembentukan PMS adalah sebagai pemerinci batas-batas kebudayaan sebagai orang Simalungun. Dengan demikian, dua peristiwa besar tersebut dapat dimaknai sebagai awal bangkitnya spirit Hasimalungunon.

Periode terpenting dalam proses sejarah terbentuknya lembaga PMS adalah dimana pada periode ini banyak pergerakan separatisme pada saat itu. Hal serupa juga disampaikan oleh Radjamin purba yang mengatakan, “bahwa meebaknya suatu ancaman disintegritas bangsa oleh daerah-daerah berupa penolakan terhadap otoritas pusat. Gerakan gerakan separatisme yang bergejolak itu mereka sebut dengan PRRI dan DI/TII.

Pergerakan ini disebabkan karena telah terjadi polarisasi politik di pemerintahan Soekarno. Sentimen etnis dan agama juga menjadi latar belakang munculnya ketidakpuasan pemerintah di daerah. Berbagai persoalan itu hanyalah persoalan yang datang belakangan dan membuat situasi semakin memanas. Permasalahan utama hingga terjadinya gerakan ini merupakan ketidakpuasan pemerintah daerah yang telah bertahun-tahun dipendam kepada pemerintah pusat.

Hal inilah menurut radjamin purba perlunya penguatan identitas etnis khususnya etnis Simalungun, karena menurut beliau kebudayaan yang terlepas dari akarnya akan berdampak kepada masyarakat yang kehilangan identitasnya pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman separatisme di tanah air. Senada dengan hal tersebut Raminah Boru Garingging menyatakan proses pengutan Identitas Simalungun adalah proses yang cukup panjang sehingga perlunya sebuah lembaga adat sebagai

sistem pengatur adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting etnik Simalungun.

Menurut Raminah terbentuk lembaga adat partuha Maujan Simalungun adalah murni atas dasar kesadaran etnik Simalungun terhadap kebudayaan Simalungun yang pada saat itu sudah mengalami pasang surut terbelenggu oleh masa lalu. Menurut beliau penguatan melalui lembaga adat PMS tidak begitu maksimal, karena pada kenyataannya GKPS yang banyak berperan dalam proses pengatan Identitas Simalungun. Senada dengan beliau, Hisarmah berpendapat bahwa lembaga elemen orang Simalungun seperti: GKPS, Partuha Maujana Simalungun (PMS), Museum Simalungun, Universitas Simalungun (USI), Pemerintah kabupaten Simalungun, Ikatan Keluarga Simalungun Islam (IKEIS) yang paling menonjol dalam merawat dan menggunakan identitas Simalungun, adalah GKPS.

Sebagai lembaga adat yang lahir ditengah banyaknya gerakan saporitisme diIndonesia tentunya PMS mempunyai tantangan sendiri. Menurut Djapanten Purba, tidak banyaknya arsip yang ditinggalkan oleh PMS periode pertama mengenai apa dan bagaimana PMS pada saat itu. Menurut beliau gerakan-gerakan separatis yang terjadi pada saat itu tidak mempengaruhi PMS secara langsung. Justru pada saat itu masyarakat Simalungun sedang semangatnya dalam menguatkan identitas Simalungun.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, Identitas primordial orang Simalungun (*hasimalungunon*) telah ada sejak etnis ini jauh sebelum terbentuknya Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun. Keterkejutan yang luar biasa terjadi sebagai dampak perjumpaan orang Simalungun dengan kaum pendatang yang jumlahnya sangat besar dan diluar dari dugaan mereka. Dampak dari perjumpaan itu mengakibatkan ambigu pada diri orang Simalungun. Para pendatang yang awalnya sebagai kuli kontrak perkebunan, secara bebas mengembangkan kebudayaan mereka di wilayah Simalungun. Kedua, penguatan identitas Simalungun sudah berlangsung sejak lama khususnya dikalangan gereja akibat penggunaan dan dominasi bahasa batak toba dalam penyebaran injil ditanah Simalungun. Terbentuknya lembaga adat Partuha Maujana Simalungun adalah sebagai momentum awal dalam penggalan dan revitalisasi kebudayaan dan identitas orang-orang Simalungun dalam merincikan batas-batas kebudayaan dan identitas mereka. Ketiga, melalui seminar kebudayaan dan pembentukan Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun, telah ditetapkan bahwa '*ahap*' adalah identitas orang Simalungun. Hal ini merupakan perumusan dan perevitalisasian identitas setelah mengalami berbagai perubahan sosial budaya. Adanya hegemoni dan dominasi etnis lain memaksa orang Simalungun menentukan basis identitasnya sebagai cara membedakannya dengan kelompok lain. Menurut teori Geertz bahwa identitas etnis dapat dibentuk oleh berbagai sentimen primordial seperti kekerabatan, agama dan bahasa yang berlaku bagi orang Simalungun. Namun, perincian batas-batas kebudayaan Simalungun masih banyaknya

pembahasan-pembahasan unsur kebudayaan Simalungun yang belum selesai adalah menjadi tugas generasi selanjutnya untuk menyelesaikannya.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku dan Jurnal

- Anderson, John. 1826. *Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823*. William Hackwood.
- Barth, Fredrik. 1998. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Waveland Press.
- Liddle, R William. 1970. *Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study*. London: Yale University Press.
- Lombard, Denys, and Anthony Reid. 1982. "The Blood of the People, Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra." *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. <https://doi.org/10.2307/3632197>.
- Lumbantobing, Andar. 1992. *Makna Wibawa Jabatan Dalam Gereja Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- N.N. 1904. "SoK Bisluit No. 34, 7 September." ANRI.
- . 1941. *District Simaloengoen*. Sinalsal.
- Neiboer, MvO F. J. 1934. "SoK Serie Ie No. Reel Film 21,." ANRI.
- Pelly, Usman. 2016. *Etnisitas Dalam Politik Multikultural*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Saragih, Hisarma. 2018. "Dinamika Penguat Identitas Etnik Simalungun (Hasimalungunon) Di Balik Berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun." Universitas Sumatera Utara.
- Saragih, Sortaman. 2008. *Orang Simalungun*. Jakarta: Citama Vigora.
- Sipayung, Jon Henri. 2014. "PERUBAHAN BUDAYA ETNIK SIMALUNGUN DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT (IBAGAS DEAR)." Universitas Negeri Medan.
- Tarigan, Andri Ersada. 2014. "Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen: Peranannya Dalam Pelestarian Budaya Simalungun Dan Penyebaran Agama Kristen (1928-1942)." Universitas Sumatra Utara.
- Tideman, Jan. 1922. *Simeloengoen: Het Land Der Timoer-Bataks Im Zijn Vroegere Isolatie En Zijn Ontwikkeling Tot Een Deel van Het Cultuurgebied van de Oostkust van Sumatra*. Leiden: SC van Doesburgh.

### Narasumber

Raminah Boru Garingging (84 Tahun), wawancara pada 18 Agustus 2017.